

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Oleh

NETI SUNARTI

Dosen Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

## Abstrak

*Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dengan tujuan sebagai serangkaian tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program kebijakan pembangunan banyak sektor yang menyangkut kepentingan publik dimana yang melibatkan peran dan tindakan aparatur negara yang menyangkut governance karena menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, maupun masyarakat madani.*

**Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Program Pembangunan**

## PENDAHULUAN

Keadilan bernegara dan berpemerintahan adalah bagaimana pembangunan dilaksanakan secara nyata dan merata, banyak para ahli beragumen tentang pembangunan yang ideal dengan model-model yang beraneka sesuai dengan latar belakang potensi kedaerahan atau lokal, yang berorientasi pada infrastruktur pada pembangunan mental masyarakatnya dan memaksimalkan peran-peran pemerintah atau reduksi total konsistensi pemerintah tentang pembangunan, namun yang utama banyak pembangunan yang kurang konsisten terhadap peran masyarakat yang dibangun baik vertikal atau horizontal, sehingga memunculkan ketimpangan pembangunan dan efek sosial lainnya. Pembangunan haruslah menjadi arena kesejahteraan masyarakat, ekspektasi ini menyiratkan amanat undang-undang tentang pembangunan nasional sebagai dasar utama kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan tidak hanya meliputi pembuatan simbol-simbol kenegaraan, monumen nasional, proyek mercusuar atau kebijakan-kebijakan yang kurang populis, akan tetapi agar lebih mengharmoniskan pembangunan pada daerah-daerah yang selaras dengan pencanangan otonomi daerah yang berbasis kesejahteraan. Selama ini otonomi

daerah sering disalah artikan dengan pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, walaupun itu yang terjadi secara umum, namun inti dari otonomi dan pembangunan adalah manajemen kedaerahannya secara maksimal dan tepat guna.

Landasan utama pembangunan daerah menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah adalah pembangunan yang berorientasi potensi kekhasan suatu daerah. Ini sangat memungkinkan, bagaimana pembangunan menyentuh titik lemah suatu daerah sehingga resiko penyimpangan dapat sangat diminimalisir, dan meningkatkan nilai guna suatu masyarakat kedaerahan.

Dalam pembangunan sesuai dengan desentralisasi diperlukan adanya program yang terencana secara bertahap di mana diperlukan gagasan-gagasan baru sehingga sesuai dengan tujuan-tujuan dan sarana-sarana suatu program. Dalam pelaksanaan program tersebut tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai merupakan suatu perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Untuk melaksanakan semua program supaya terarah maka perlukan implementasi kebijakan karena sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja yang di buat

pemerintah dan masyarakat diuntut untuk mentaati aturan yang mempunyai sifat yang mengikat. Dengan diadakan program pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan tapi tidak terlepas dari suatu kebijakan yang berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat

Adapun tujuan dari kebijakan untuk melaksanakan program pembangunan adalah salah satu pilihan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk memberikan penjelasan, membenarkan atau menerangkan seprangkat tindakan yang baik yang nyata kepada masyarakat yang pada umumnya memiliki kerangka kumpulan-kumpulan keputusan tertentu yang berhubungan dengan kebijakan tersebut dan dan dibutuhkan adanya kesadaran dari masyarakat dan ikut harus mendukung untuk mewujudkan pembangunan ke depan untuk menjadi masyarakat yang berkualitas.

Dalam tulisan ini maka ada gagasan-gagasan untuk dapat memperjelas beberapa penjelasan yang akan diuraikan .

## TINJAUAN TEORITIS

### Implementasi

Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Kajian implementasi merupakan proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.

Agustino (2006:153) mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang. Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi

maslaah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya

Selanjutnya menurut pendapat Budi Winarno (2002 : 101 – 202), implementasi adalah

Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III (Winarno, 2002:126-151), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

- (a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan  
Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sarana-sarana suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan
- (b) Sumber-sumber kebijakan  
Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
- (c) Komunikasi antar organisasi dan akegiatan-kegiatan pelaksanaan.  
Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.
- (d) Karakteristik badan-badan pelaksana  
Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- (e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
- (f) Kecenderungan para pelaksana (*implementers*)
- (g) Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan

Implementasi Kebijakan Pemerintah  
dalam Melaksanakan Program Pembangunan  
**NETI SUNARTI**

mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

Pendapat lain dikemukakan Edward III (Santoso, 1980:43) bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila didukung 4 (empat) variabel pendukung yaitu:

1. Komunikasi, mempunyai peranan yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan dikerjakan ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah atasan terhadap pelaksana kebijakan sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten.
2. Sumber daya, bukan hanya menyangkut sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya mineral lainnya yang mendukung kebijakan tersebut dan faktor dana
3. Disposisi/Sikap pelaksana, sebagai kegunaan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, jika penerapan kebijakan dilakukan secara efektif. Pelaksanaan bukan hanya harus tahu apa yang harus mereka kerjakan, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan itu.
4. Struktur birokrasi, bahwa struktur birokrasi mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini ada 2 karakteristik birokrasi yang umum, yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transformasi dalam pertanggung jawaban di antara unit organisasi.

### **Kebijakan**

Kebijakan pemerintah adalah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk keperluan tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada hubungannya dengan kepentingan umum. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Berkaitan dengan pengertian kebijakan tersebut, Friedrich (Winarno, 2002 : 16) memberikan pengertiannya sebagai berikut :

Kebijakan sebagai suatu arah atau tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan publik (*public policy*) yaitu kebijakan Negara, kebijakan yang dibuat Negara. kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Anderson, (Sunggono, 1994:23), implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah :

- (a) Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- (b) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
- (c) Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
- (d) Bahwa kebijakan public itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- (e) Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Kata kebijakan sering dikaitkan dengan kata perintah sehingga menimbulkan pengertian baru yaitu kebijakan pemerintah Selanjutnya Anderson masih dalam kutipan Islamy (2003 : 19) mengemukakan pendapatnya tentang kebijakan pemerintah, sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan pemerintah itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang beorientasi pada tujuan;
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah;
4. Bahwa kebijakan pemerintah itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan

beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif, dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

5. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

### Tujuan Kebijakan

Kebijakan, adalah suatu pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dengan maksud agar pilihan ini dapat menjelaskan, membenarkan, mempedomani, atau mengkerangkakan seperangkat tindakan, baik yang nyata maupun tidak. Pada umumnya, merupakan suatu kerangka, yang darinya keputusan tertentu dibuat. Dalam beberapa hal, kebijakan merupakan kumpulan dari keputusan-keputusan yang lebih kecil. Ia merupakan akumulasi hasil dan kegiatan yang bersifat inkremental.

Kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor politik untuk mengatasi suatu masalah atau persoalan. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yang menurut (Sunggono, 1994 : 12), yaitu :

- a. Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator);
- b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator);
- c. Memadukan berbagai aktifitas (Negara sebagai koordinator);
- d. Menunjuk dan membagi benda material dan material negara sebagai distributor).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan haruslah memberikan

manfaat bagi seluruh anggota masyarakat bukan sekedar hanya untuk kepentingan pemerintah belaka akan tetapi suatu kebijakan haruslah sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat sehingga akan menerima, taat dan patuh serta dengan kesadaran diri siap untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut, sehingga apabila keinginan pemerintah sebagai penguasa tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat sebagai penerima dampak dari kebijakan tersebut maka dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut akan mengalami hambatan dan kebijakan tersebut tidak akan pernah berjalan secara efektif.

### Jenis Kebijakan

Mengenai jenis kebijakan, Anderson (Sutopo dan Sugiyanto, 2001;5) berpendapat bahwa kebijakan publik dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. *Substantive policies and procedural policies.*

*Substantive policies* adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya : kebijakan politik luar negeri, kebijakan dibidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari *substantive policies* adanya pokok masalahnya (*subject matter*) kebijakan. *Procedural policies* adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan public, serta cara bagaimana suatu kebijakan public diimplementasikan.

- b. *Distributive, Redistributive, and Self Regulatory Policies.*

*Distributive policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. *Redistributive policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

- c. *Material policies*

*Material policies* adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang

nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

- d. *Public Goods and Private Goods policies*  
*Public goods policies* adalah suatu kebijakan mengatur tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak. *Private Goods Policies* adalah kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

#### Sifat Kebijakan

Menurut Winarno, (2002: 19-20). Sifat kebijakan bisa diperinci menjadi beberapa kategori, yaitu :

- Tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditunjukkan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau system politik.
- Keputusan kebijakan (*policy decisions*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan public. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menciptakan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administrative atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.
- Pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan public. Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislative, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administrative dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu.
- Hasil kebijakan (*policy outputs*) lebih merujuk ke manifestasi nyata dari kebijakan public, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

- Dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih menunjuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Definisi sifat kebijakan publik diatas adalah jelas bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dan kemudian di evaluasi pelaksanaannya.

#### Kebijakan Pembangunan Publik

Dalam kebijakan pembangunan banyak sektor yang menyangkut kepentingan publik dimana yang melibatkan peran dan tindakan aparatur negara yang menyangkut governance karena menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, maupun masyarakat maadani. Adapaun beberapa kebijakan adalah yang di jalankan oleh pemerintahn untuk mewujudkan kesejahteraan

#### Kebijakan Pengetasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah merupakan masalah yang paling utama di berbagai daerah yang ditadai dengan oleh keterpurukan ekonomi, pengangguran, keterbelakangan pendidikan, kemampuan berusaha dan terbatas akses untuk kegiatan sosial ekonomi. Kemiskinan akan menghambat untuk mewujudkan kesejahteraan. Menurut Iskandar Jusman ( 2004 : 25) ciri dari kemiskinan adalah :

Rumah tangga miskin pada umumnya adalah rumah tangga yang mempunyai anggota banyak yaitu kepala rumah tangganya merupakan pekerja rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga anggota rendah, seringkali berubah, sebagian besar mereka yang telah bekerja masih mau menerima tambahan pekejaan apabila ditawarkan dan sebagian besar sumber pendapat utamanya adalah pertanian

Untuk melindungi keluarga tersebut dan kelompok masyarakat miskin maka yang diperlukan program berbagai progeam diantaranya adalah ketahanan pangan serta perlindungan terhadap keschatan dan masyarakat pun perlu adanya pendidikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun

Strategi Kebijakan adalah menurut Adisasmita Raharjo (2010 : 178)

Kebijakan kemiskinan harus diperkuat dengan peningkatan kemampuan masyarakat sebagai suatu kelompok masyarakat, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu usaha kegiatan yang produktif serta untuk mengetaskan kemiskinan adalah menciptakan ketentraman dan memantapkan kestabilan ekonomi, sosial dan politik untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan upaya mengetaskan kemiskinan

Berdasarkan pernyataan diatas adalah merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dengan menghasilkan suatu kegiatan usaha yang sangat produktif yang dapat menguntungkan masyarakat

#### **Kebijakan Pembangunan Pendidikan**

Dalam Program kebijakan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila dan programnya adalah menurut Adisasmita Raharjo (2010 : 179) yaitu :

- a. Program Peningkatan Pemerataan Pendidikan ( dasar, menengah, dan tinggi ) adalah memperluas jangkauan pada dasar, menengah, dan tinggi sehingga masyarakat lebih mudah mengaksesnya sekolah dan meningkatkan daya tampung sekolah yang berada pada wilayah padat penduduk
- b. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga guru/pengajar dan tenaga pendukung dan penyediaan sarana prasarana yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar-mengajar serta penyempurnaan kurikulum
- c. Pembinaan Pendidikan Kurikulum adalah untuk memfasilitasi warga masyarakat untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan, dan keterampilan potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidup

Berdasarkan kesimpulan diatas maka program pembangunan pendidikan merupakan tuntunan masyarakat yang berkembang untuk menghendaki adanya perbaikan di bidang pendidikan maka kebijakan yang ditetapkan

oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia maka masyarakat diharuskan untuk mengikuti program pemerataan pendidikan.

#### **Kebijakan Pembangunan Kesehatan**

Pembangunan dalam bidang kesehatan adalah untuk memberikan kesehatan kontribusi yang sangat baik kepada masyarakat yang meliputi pembentukan lingkungan yang sehat dan perilaku hidup sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang efektif dan efisien. Profesionalisme tenaga kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu harus didukung dengan menguasai pengetahuan yang tinggi dan penerapan nilai-nilai moral dan efektif profesi yang tinggi

Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan adalah harus disusun program pembangunan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat. Program adalah menurut Pasolong (2007 : 92) adalah :

Merupakan kumpulan dan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa organisasi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan diadakan program adalah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan, efektivitas dan efisiensi penggunaan kesehatan dan sebagainya tetapi supaya program terlaksana maka dibutuhkan kerjasama dan partisipasi masyarakat.

#### **Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun kelembagaan sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya berasal darisendiri untuk pemerintah dan masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat untuk mengelola kegiatan usaha ekonomi sebagai pemberi kemampuan atau keberdayaan. Adapun sasaran pokok program kebijakan pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2001 : 166) adalah :

Implementasi Kebijakan Pemerintah  
dalam Melaksanakan Program Pembangunan  
**NETI SUNARTI**

1. meningkatkan pendapatan masyarakat ditingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat dibawah garis kemiskinan
2. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat pedesaan
3. berkembangnya dan meningkatnya kapsitas kelembangaan masyarakat, aparat maupun warga

Dari hal tersebut diatas merupakan salah satu upaya untuk menyelenggarakan perekonomian pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu untuk memberantas kemiskinan maka tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dengan mengadakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMK di berbagai kegiatan ekonomi sesuai dengan kondisi masyarakat.

#### **Kebijakan Pemukiman/Perumahan**

Pemukiman/ perumahan adalah merupakan penyediaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat yang khususnya mempunyai pendapatan rendah maka pemerintah membuat kebijakan pemukiman yang teratur, layak huni dan ramah lingkungan selain itu juga memberikan kredit untuk masyarakat. Menurut Adisasmita Raharjo ( 2010 : 189) yaitu :

- a. Pengembangan institusi pembiayaan primer dan sekunder dalam pembangunan perumahan/ pemukiman
- b. Pengembangan sistem penyediaan pembangunan dan perbaikan hunian layak
- c. mengembangkan subsidi hunian bagi masyarakat miskin
- d. meningkatkan kemampuan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana pemukiman di kawasan perkotaan dan pedesaan
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan pedesaan supaya tidak berlebihan

Dalam Kebijakan Pemukiman/perumahan merupakan bagian unuk melancarkan pembangunan dengan menyediakan membangun rumah sederhana dan rumah sangat sederhana hal ini adalah untuk memberikan hunian kepada masyarakat baik penduduk diperkotaan maupun pedesaan. Pemukiman/perumahan merupakan pengembangan program kelembangaan pembiayaan perumahan bertujuan untuk mengembangkan institusi pembiayaan yang

tertumpu pada mekanisme pasar primer dan sekunder.

#### **PEMBAHASAN**

Implementasi adalah sebagai rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan. sedangkan kebijakan adalah merupakan penyelesaian tujuan adari kegiatan pemerintah yan tidak selalu dilihat tetapi perlu adanya ide atau gagasan -gagasan yang melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan kegiatan yang penting. Bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada diusulkan dalam beberapa kegiatan suatu masalah

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan yang bertujuan untuk menyerap dinamika dalam masyarakat akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar terciptanya hubungan harmonis dimana berorientasi pada kepentingan publik dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik dan buruknya yang dapat ditimbulkan .Sedangkan menurut Agustino (2006:153) mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia dimasa depan adalah perwujudan perekonomian dalam rangka pembangunan terutama di daerah sebagai otonomi daerah hal ini adalah sebagai pengembangan yang nyata dan bertanggung jawab untuk melakukan kebijakan. dengan ada kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pemecrintah untuk memberdayakan masyarakat maka diperlukan program dengan tujuan untuk adanya pengelolaan penerimaan terutama untuk pemerintah daerah adapun tujuan pogram adalah menurut Adisasmita Raharjo ( 2010 : 123) yaitu :

Program adalah ditujukan untuk mendorong kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan secara efisien dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya peranan pendapatan Asli Daerah secara signifikan dalam pembiayaan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah

Program sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan dan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan”

### KESIMPULAN

Implementasi kebijakan adalah membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan akan menjadi identifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Juga sebagai alat administrasi yang meliputi berbagai aktor diantaranya adalah, organisasi, prosedur dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna memperoleh tujuan yang diinginkan serta yang harus dipahami adalah sebagai proses, keluaran (output) maupun hasil

Kebijakan adalah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk keperluan tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada hubungannya dengan kepentingan umum. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan baik untuk seseorang, kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, selain itu juga memiliki arah dalam rangka merealisasikan suatu sasaran. Adapun tujuan dari kebijakan tersebut adalah memelihara ketertiban secara umum juga memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal, negara sebagai stimulator selain itu juga memadukan berbagai aktifitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pelaksanaan implementasi kebijakan adalah melaksanakan program yang

mengarah kepada tujuan bersama dengan berbagai program-program untuk pembangunan terutama memanfaatkan potensi daerah berdasarkan desentralisasi dari mulai memberantas Adapun program-programnya adalah memberantas kemiskinan untuk menjadi hidup sejahtera, pendidikan masyarakat, program kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pemukiman hal ini dilakukan adalah sebagai pengelolaan sumber secara efektif. Selain program harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan masyarakat yang aktif guna mencapai sasaran, tujuan yang ditetapkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Penerbit Media Persindo (Anggota IKAPI).
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang (1994:23). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta
- Santoso, 1980. *Analisa Kebijakan Publik: konsep, Teori Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sutopo & Sugiyanto 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: LAN-RI
- Sumodingrat Gunawan 2001. *Kemiskinan, Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta Impact
- Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Medpress
- Wahab, 1997. *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* Malang.